

INTISARI

Pemerintah daerah wajib mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien (UU 17/2003; UU 1/2004; PP 58/2005). Berdasarkan penelitian Ritonga et al. (2012) menyimpulkan bahwa tingkat solvabilitas jangka pendek pemerintah daerah di Indonesia tinggi yaitu rasio kas sebesar 29,41, rasio cepat sebesar 34,30, dan rasio lancar sebesar 38,55 kali aset lancarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki solvabilitas jangka pendek yang kuat, tetapi dengan jumlah aset lancar yang berlebihan. Melihat komposisi aset lancar yang didominasi oleh kas, maka angka rasio solvabilitas keuangan jangka pendek yang tinggi di Indonesia disebabkan oleh manajemen kas yang belum dikelola secara efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis rasio lancar optimal pemerintah daerah (studi kasus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi berupa Neraca, LAK, dan CaLK Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013, 2014, dan 2015 serta data dari *website* perbankan yang resmi, yang digunakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyimpan kasnya. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperdalam analisis rasio lancar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu memodifikasi aset lancar dengan cara menentukan saldo kas optimal model Miller & Orr dan memodifikasi kewajiban lancar tahun 2013 dan 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio lancar optimal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditentukan dengan modifikasi tersebut. Secara spesifik, Terdapat penurunan rasio lancar pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 sebesar 75,74%, tahun 2014 sebesar 94,02%, dan tahun 2015 sebesar 26,15%. Penurunan rasio lancar tahun 2013 dan 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan rasio lancar tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 dan 2014 lebih banyak memiliki kas di kas daerah dibandingkan kas di kas daerah tahun 2015. Perbedaan tersebut disebabkan faktor dana keistimewaan yang diterima Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kali pertama tahun 2013.

Kata kunci: rasio lancar, aset lancar, kewajiban lancar, saldo kas optimal

ABSTRACT

The regional governments shall manage their finances in accordance with the principles of economical, effective, and efficient (UU 17/2003 ; UU 1/2004 ; PP 58/2005). A research of Ritonga et al. (2012) concluded and showed that the high level of short-term solvency of local governments in Indonesia, namely high cash ratio amounted to 29.41, quick ratio of 34.30, and a current ratio of 38.55 times its current assets. This indicates that local governments have a strong short-term solvency, yet with an excessive amount of current assets. Additionally, since the current asset composition mostly dominated by cash, it might be said that the high number of short term financial solvency ratios in Indonesia resulted from cash management that has not been managed effectively and efficiently. This study hence conducted to analyze the optimal current ratio of the provincial government (a case study of Local Government : Special District of Yogyakarta).

This study used descriptive qualitative approach. The collection of secondary data obtained by the study of documentation in the form of balance sheet, LAK, and CaLK of Local Government of Yogyakarta Special District in 2013, 2014, and 2015, as well as utilized data from banking official website, which used by the Local Government of Yogyakarta Special Region to save its cash. In addition, some interviews had been conducted to deepen the analysis of the current ratio of the Local Government of Yogyakarta Special District. Furthermore, the data analysis conducted in this study aimed at modifying the current assets by determining the optimal cash balance model of the Miller & Orr and modifying current liabilities in 2013 and 2014.

The study concluded that the optimal current ratio of the Local Government of Yogyakarta Special District could be determined by such of modification. Specifically, There is a decrease in the current ratio at the Local Government of Yogyakarta Special District in 2013 amounted to 75.74%, in 2014 amounted to 94.02%, and in 2015 amounted to 26.15%. A decrease of the current ratio in 2013 and 2014 is higher than the current ratio in 2015. This condition indicates that the Local Government of Yogyakarta Special District in 2013 and 2014 have more cash than cash in 2015. The difference clearly appeared due to first time privilege funds received by the Local Government of Yogyakarta Special District in 2013.

Keywords : current ratio, current assets, current liabilities, optimal cash balance.